



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Polda Siap Usut!

Walikota dan Kontraktor Diminta Sama-sama Laporkan

BENGKULU - Polda Bengkulu siap mengusut dugaan pencemaran nama baik, bila Walikota Bengkulu H. Helmi Hasan, SE melaporkannya ke direktur

PT Karya Dutamandiri Sejahtera, Amiruddin Murtuza. Terhadap kasus dugaan pemerasan dilakukan oleh oknum konsultan pengawas H.Endri selaku Direktur Utama PT Civarligma Engineering dan Maas Syabirin Taher selaku Kabid Cipta Karya atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bengkulu yang mengatasnamakan Walikota Bengkulu.

▶ Baca **PODA...Hal 11**

Sambungan dari halaman 1

"Tentunya semua laporan yang masuk akan ditindaklanjuti," kata Kabid Humas Polda Bengkulu, AKBP Sudarno S.Sos MH

Namun sejauh ini kedua belah pihak, baik Walikota maupun Amirudin belum ada melapor ke Polda. Meskipun banyak desakan agar walikota segera membuat laporan agar ada titik terang dengan adanya pengusutan oleh penegak hukum. "Ya jika pencemaran nama baik, segeralah melapor, bawa bukti-buktinya," ujarnya.

Pengamat Hukum Pidana Unihaz, Sapuan Dani, SH, MH mengatakan bahwa apabila laporan Amirudin ke Kejagung atas dugaan pemerasan yang menyeret nama walikota tersebut dirasakan tidak benar, sebaiknya pihak yang merasa dirugikan atas laporan itu juga melaporkannya balik. Laporan balik itu sebaiknya dilakukan ke Polda Bengkulu dengan kasus pencemaran nama baik. Selain itu, dirinya juga menilai bahwa kasus ini terlihat agak rumit. Dirinya juga mempertanyakan kenapa pihak kontraktor tidak melaporkannya ke Polda Bengkulu karena itu dugaan pemerasan.

"Jika merasa benar ya sebaiknya dilaporkan balik. Selain itu juga harusnya pihak kontraktor melaporkannya ke Polda bukan ke Jampidsus karena itu kan pemerasan," tutupnya.

Ketua Komisi II DPRD Kota Bengkulu, Indra Sukma, mengungkapkan kalau Komisi II DPRD berencana akan memanggil pihak-pihak yang terkait soal permasalahan ini seperti H. Amiruddin dari pihak pelapor atau kontraktor, H. Endri sebagai Konsultan Proyek, Maas Syabirin sebagai Kabid Cipta Karya

PUPR.

"Kita akan memanggil beberapa pihak ini untuk meminta klarifikasi soal pemberitaan yang lagi heboh saat ini, yaitu soal adanya laporan pemerasan yang dilakukan oleh beberapa oknum terhadap pihak kontraktor. Kita akan menanyakan soal tersebut karena ini sangat meresahkan bagi masyarakat," jelasnya.

Di tempat terpisah Ketua Fraksi Golkar dan Anggota Komisi III DPRD Kota Bengkulu, Mardensi mengharapkan kasus ini diselesaikan dengan cepat dan secara hukum. Kalau memang pihak kontraktor ada menantang walikota untuk membawa kasus ini ke ranah hukum, memang harus diselesaikan ke ranah hukum. Karena masalah ini bisa meresahkan masyarakat Bengkulu kalau terus berlarut-larut. Kemudian pembangunan alun-alun Kota Bengkulu itu bisa diselesaikan dan tidak terbengkalai seperti ini.

"Kalau pembangunan alun-alun ini terbengkalai dan tidak selesai seperti ini akan merugikan beberapa pihak termasuk masyarakat juga dirugikan karena pembangunan tersebut pakai APBD yang di dalamnya juga ada uang rakyat," ungkapnya.

Wakil Ketua I DPRD Kota Bengkulu, Marliadi, menjelaskan kalau melihat kasus yang sekarang berarti kasus ini sudah di bawa ke ranah hukum melalui Kejagung. Silakan diselesaikan ke ranah hukum. Nanti kan bisa diketahui siapa yang benar dan siapa yang salah.

"Kalau saya tidak mengetahui mana yang benar dan salah, kita serahkan saja ke ranah hukum soal kebenaran yang sebenarnya," katanya.

Untuk pembangunan alun-alun ini

di tahun ini sudah dipastikan tak akan selesai. "Kemudian untuk pembangunan di tahun depan pihak DPR sebaiknya untuk menyelesaikan kasus administrasi yang belum diselesaikan terhadap kontraktor sekarang dan pembayaran yang belum diselesaikan untuk lunaskan terlebih dahulu supaya nanti tidak ada kasus yang baru lagi," tutup Marliadi.

Sebelumnya PT Karya Dutamandiri Sejahtera selaku kontraktor pengerjaan proyek alun-alun Kota Bengkulu melaporkannya ke Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Republik Indonesia kemarin (12/12). Laporan itu dilyangkan karena kontraktor merasa diperas oleh beberapa oknum konsultan pengawas yakni H.Endri selaku direktur utama PT Civarligma Engineering dan Maas Syabirin Taher selaku Kabid Cipta Karya atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bengkulu yang mengatasnamakan Walikota Bengkulu dan pihak lainnya.

Kuasa Direktur PT Karya Dutamandiri Sejahtera, Amiruddin Murtuza menjelaskan bahwa pemerasan itu bermula saat kontraktor mengajukan termin 50 persen sejak 40 hari yang lalu. Namun sampai sekarang, pihaknya tidak juga dibuatkan berita acara pembayaran dengan alasan konsultan dan PPK proyek belum mendapatkan sejumlah uang dari sang kontraktor. "Kontraktor merasa diperas dan dirugikan oleh oknum konsultan dan PPK dengan mengatasnamakan Walikota dan pihak lainnya, totalnya sudah Rp 2 miliaran," ungkapnya. (cw2/cup)